

BAB II

ANALISA KEPENTINGAN KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* BAGI

D.I. YOGYAKARTA DAN VICTORIA, AUSTRALIA

DI BIDANG KEBUDAYAAN

Paradiplomasi atau yang juga disebut sebagai *parallel-diplomacy* merupakan kerangka kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, lembaga internasional/NGO, dan Mitra Pembangunan dengan tujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Aktivitas ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ivo Duchacek berpendapat tentang peranan pemerintah daerah atau negara bagian sebagai aktor internasional baru yang terintegrasi dalam sistem dunia bersifat saling ketergantungan, sebagaimana ungkapannya dalam buku karangan Rodrigo Tavares bahwa, “*subnational presence on the international scene has become a fact of life in an interdependent world.*”³⁵

Hal ini diperkuat oleh pendapat Ivo Daalder, bahwa Kota sebagai aktor non-negara telah meningkatkan peranannya untuk mempengaruhi aktivitas dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial dan budaya di dunia global bahwa, “*global cities are increasingly driving world affairs—economically, politically, socially and culturally. They are no longer just places to live in, but they have*

³⁵ Rodrigo Tavares, *Op. Cit.*, hal. 1 *et. Seqq.*

emerged as leading actors on the global stage".³⁶ Menurut Benjamin R. Barber, Kota dalam hal ini adalah *subnational government* yang merepresentasikan para pihak yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat di suatu daerah dan dapat terkoneksi melalui kebudayaan, perdagangan/ekonomi, dan komunikasi yang terjalin, bahkan pada level global. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menjadi tantangan pemerintah dalam menjamin kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³⁷ Untuk itu dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah dan negara bagian diharapkan dapat mewujudkan kerja sama daerah dengan pihak di luar negeri, yang juga dikenal dengan istilah paradiplomasi. Maka diperlukan adanya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada bab ini, penulis akan berfokus pada pembahasan sub bab yang berkaitan dengan faktor utama yaitu persamaan karakteristik dan potensi daerah yang melatarbelakangi adanya kerja sama *sister province* antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia di bidang kebudayaan. Di samping itu, penulis juga akan menjelaskan tentang apa yang menjadi urgensi kepentingan kerja sama *sister* bagi kedua daerah, kronologi terjadinya kerja sama *sister* yang menjelaskan tentang urutan kejadian sebelum penandatanganan MoU kerja sama, serta bagaimana

³⁶ Rodrigo Tavares, *Op. Cit.*

³⁷ Benjamin R. Barber, *IF MAYORS RULED THE WORLD: Dysfunctional Nations, Rising Cities*, NBER Working Papers, (Yale University Press: 2013), lihat: <http://www.nber.org/papers/w16019>

implementasi kerja sama tersebut selama berlakunya MoU sejak tahun 2017 hingga 2020.

2.1 Persamaan Karakteristik Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang adanya pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala negara. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.³⁸ Salah satu implementasi urusan pemerintahan konkuren dapat dilihat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh masing-masing daerah di Indonesia atas dasar Otonomi Daerah. Kerja sama daerah menjadi cara bagi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan.³⁹ Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar Daerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri.

Menurut pemaparan dari Ibu Dameria selaku Koordinator Bidang Kerja Sama Antar Negara Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa urgensi kerja sama daerah adalah pemenuhan pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan ekonomi dan investasi.⁴⁰ Jika dikaitkan dengan aktivitas

³⁸ Presiden Republik Indonesia, *Op., Cit.*, Pasal 9 ayat (3).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 363.

⁴⁰ Dameria Febriyanti Panjaitan, *Op. Cit.*

paradiplomasi, maka kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri mencakup bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi Daerah, dan kerja sama lainnya tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama luar negeri dengan pemerintah di luar negeri (KSDPL) adalah kesamaan status administrasi atau kesetaraan wilayah. Pada kerja sama *sister province* DIY – Victoria, terdapat perbedaan sistem pemerintahan, akan tetapi keduanya masih memiliki persamaan sebagai sebuah wilayah yang menjadi bagian dari suatu negara yang utuh. Keduanya memiliki peran sebagai wakil dari Pemerintah Pusat/*State-Centre* untuk menjalankan kewenangan di daerahnya masing-masing. Selain itu, terdapat dua syarat lainnya yaitu kerja sama luar negeri yang saling menguntungkan (*mutualism*) dan peningkatan hubungan antar masyarakat.⁴¹ Hal ini menjadi tolok ukur pelaksanaan KSDPL dengan menonjolkan potensi daerah yang dimiliki kedua pihak di bidang kebudayaan, terutama seni musik dan manajemen pertunjukkan. Sesuai dengan bunyi dari Pasal 367 ayat (1), bahwa kerja sama persahabatan ini bertujuan untuk memungkinkan adanya pertukaran budaya, *transfer knowledge*

⁴¹ Kementerian Dalam Negeri, *Op. Cit.*

antara pelajar dan seniman DIY di kedua daerah, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pertunjukkan kebudayaan, promosi potensi daerah yang dimiliki.

2.1.1 Persamaan Status Administrasi Antara DIY dan Victoria

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang selanjutnya disingkat dengan DIY merupakan sebuah daerah yang menjadi bagian dari ke-34 provinsi di Indonesia, dengan keistimewaan yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah kerajaan di Pulau Jawa dan dipimpin oleh seorang Gubernur, yang dijuluki Sultan, sebagai kepala daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah provinsi dengan keistimewaan untuk membuat pengaturan urusan pemerintahan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperjelas pada pasal 1 ayat (2) yang menyebut bahwa keistimewaan merupakan keistimewaan yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa sesuai dengan pasal 18 UUD 1954 tentang pemerintahan daerah.⁴² Adapun kewenangan istimewa tersebut mencakup hal-hal seperti tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.⁴³

Secara historis, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pasca Perjanjian Giyanti pada 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan

⁴² Majelis Permusyawaratan Rakyat, “*UUD Negara RI Tahun 1945*,” 2000, lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>, Pasal 18.

⁴³ Presiden Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012*, JDIH BPK, (Indonesia: 2012), lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>

Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualam didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara Sultan Hamengku Buwono II bergelar Adipati Paku Alam I. Di masa kolonial Belanda, hanya Pemerintahan di Kasultanan Ngayogyakarta yang diakui kedaulatannya dan terjadi kontrak politik pada tahun 1877, 1921 hingga 1940 antara Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga wilayah kerajaannya sendiri yang disebut juga dengan istilah *zelfbesturende landschappen*.⁴⁴ Hal tersebut menjadi alasan mengapa Keraton Ngayogyakarta tidak tunduk kepada Belanda.

Kontrak politik tersebut berakhir pada *Staatsblad* 1941 Nomor 47 oleh Kasultanan Ngayogyakarta dan *Staatsblad* 1941 Nomor 577 oleh Kadipaten Pakualaman. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta dijuluki dengan istilah Kooti atau Daerah Istimewa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mengkoordinasi pemerintahan tertentu secara struktural. Berakhirnya masa penjajahan yang ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden RI saat itu, membuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VII untuk menyatakan bahwa wilayah kekuasaannya tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI. Proses pengintegrasian itulah yang menjadi alasan utama pemberian predikat keistimewaan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁵

⁴⁴ Dinas Kebudayaan DIY, *BUKU PROFIL YOGYAKARTA CITY OF PHILOSOPHY*, 2020. 1-2.

⁴⁵ Humas Pemda DIY, *SEJARAH*, Jogjaprov.Go.Id, lihat: <https://jogjaprov.go.id/p/3-sejarah>

Tata kelola Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Budaya Pemerintahan SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan-Keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri, Ahli Profesional) yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam hal untuk mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang tunduk dan patuh pada nilai-nilai kearifan lokal DIY. Nilai-nilai itu merupakan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai filosofi memiliki arti sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia — dari lingkup terkecil ‘keluarga’ dan ‘masyarakat’ sebagai lingkungan hidupnya, mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada ambisi pribadi, dan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, untuk mencapai *hamemayu hayuning bawana* dibutuhkan karakteristik daerah yang ksatriya dengan memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, bertanggung jawab) dan semangat *golong gilig* berarti semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Reublik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota, dimana masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Dalam mengatur pembagian kekuasaannya

⁴⁶ Humas Pemda DIY, *SATRIYA*, Jogjaprov.Go.Id, lihat: <https://jogjaprov.go.id>

dengan daerahnya, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk menjalankan perannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Dimana kekuasaan pemerintah daerah pada urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat seperti pertahanan, keamanan, agama, yustitisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

Salah satu urusan pemerintahan daerah dalam yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan usaha pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Usaha yang dimaksud adalah kewajiban bagi daerah untuk menjalankan sebuah kerja sama yang berlandaskan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta harus saling menguntungkan. Kerja sama ini dapat dijalankan dengan beberapa pihak seperti daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradiplomasi termasuk dalam kategori usaha pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jenis kerja sama daerah dibagi menjadi 3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yaitu kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD), kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK), kerja sama daerah dengan pemda/lembaga di luar negeri (KSDPL/KSDLL).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 juga menyebutkan istilah KSDPL yang berupa kerja sama provinsi bersaudara/kembar (*sister province*) dan kerja sama kabupaten/kota bersaudara/kembar (*sister city*). Sedangkan KSDLL dapat berupa kerja sama yang merupakan penerusan kerja sama oleh pemerintah pusat dengan organisasi internasional, lembaga nirlaba berbadan hukum di luar negeri, dan mitra pembangunan luar negeri, serta kerja sama lainnya yang disetujui oleh pemerintah pusat. Baik KSDPL maupun KSDLL dalam pelaksanaannya hanya dapat diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota atas nama Daerah. Sebelum melaksanakan kerja sama, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan dapat melakukan kerja sama seperti adanya hubungan diplomatik dengan negara tujuan, menjadi urusan pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, mitra kerja sama KSDPL/KSDLL tidak boleh mencampuri urusan pemerintah dalam negeri, dan harus sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional maupun daerah.

Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan kolaboratif yang merupakan konsep kerja sama yang baru dikembangkan untuk mendorong inovasi pembangunan daerah. Implementasi pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan didukung oleh beberapa faktor penting seperti kepemimpinan, ketergantungan satu dan lainnya, insentif yang jelas dan proses pembuatan kebijakan, sumber daya yang dimiliki, sistem kolaborasi program pembangunan, serta dampak yang dihasilkan. Kepala daerah diharapkan untuk memanfaatkan peluang komoditas melalui penguatan kerja sama antar

daerah, mengembangkan ekspor ke negara lain, dan potensi-potensi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.⁴⁷

Pembagian kekuasaan di negara kesatuan seperti Indonesia yang dijelaskan sebelumnya berbeda dengan yang ada di negara federal. Negara yang menganut sistem pemerintahan federal membagi kekuasaannya berdasarkan tingkat perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh *central state* dan *sub-state governments* (SSGs). Dalam hal pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan antara Negara Pusat dan Negara Bagian dibedakan berdasarkan tujuan pembentukan negeri federal. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan bagi masing-masing antara pusat dan negara bagian untuk menentukan kebijakan di wilayahnya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Jorge A. Schiavon, penulis buku “*Comparative Paradiplomacy*” mengklasifikasikan jenis-jenis pembagian kewenangan antara *central state* dan SSGs dalam beberapa jenis kewenangan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.⁴⁸ Jenis-jenis pembagian kewenangan tersebut antara lain: eksklusif, komplementer, konsultatif, dan inklusif.

Kewenangan eksklusif merupakan kewenangan SSGs dimana pusat memiliki kontrol penuh terhadap penentuan kebijakan luar negeri negara bagian. SSGs tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatur kerja sama luar negerinya sendiri dan menjadi pelaksana kebijakan pusat. Selanjutnya terdapat kewenangan *complementary* dimana pusat tetap menjadi pemegang utama dalam kebijakan luar

⁴⁷ Dameria Febriyanti Panjaitan, *Op. Cit.*

⁴⁸ Jorge A. Schiavon, *Comparative Paradiplomacy, Comparative Paradiplomacy*, 2018, lihat: <https://doi.org/10.4324/9781351012317>

negeri dan implementasi di seluruh wilayah kekuasaannya, namun SSGs juga diberikan kekuasaan secara hukum untuk menjalankan *international will*-nya sendiri dalam hal-hal tertentu. Ketiga yaitu kewenangan konsultatif yang memberikan hak partisipasi kepada SSGs dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri, akan tetapi SSGs tidak memiliki hak secara hukum untuk menjalankan hubungan luar negerinya sendiri. Yang terakhir, terdapat klasifikasi kewenangan inklusif dimana SSGs memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negerinya yang dilindungi oleh konstitusi. Negara Australia menjadi salah satu contoh negara dengan tipe pembagian kewenangan dalam hal urusan internasional yang inklusif. Pada setiap negara bagian memiliki hak untuk menentukan kebijakannya sendiri dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di Australia sebagai Negara Persemakmuran Inggris.⁴⁹

Negara Bagian Victoria merupakan sebuah negara bagian atau institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan di bawah kekuasaan negara federal, dalam hal ini berada di wilayah Persemakmuran Australia. Pada tahun 1819, Konvensi Nasional Australia untuk pertama kalinya dilaksanakan di Sydney untuk membentuk federasi Australia. Hal ini ditujukan untuk membentuk sebuah konstitusi baru yang mengatur sistem pemerintahan dan kenegaraan pasca penggulingan sistem monarki. Victoria dan lima koloni—New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, dan Victoria bergabung dalam sebuah negara yang disebut *the Commonwealth of Australia* atau wilayah Persemakmuran Australia.

⁴⁹ Ibid.

Persemakmuran Australia menganut sistem pemerintahan *federal parliamentary constitutional monarchy* yang membagi kekuasaan pemerintahan di bawah Perdana Menteri dan negara dipimpin oleh *Governor-General of Australia* sebagai representasi dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Charles III di United Kingdom. Dimana pada 9 Mei 1901 dibentuk Parlemen federal pertama di Melbourne yang merupakan ibukota Victoria dan kemudian dipindahkan ke Canberra pada tahun 1927. Kehidupan politik di Victoria mengalami perubahan yang signifikan pasca bergabung menjadi negara bagian dalam Persemakmuran Australia. Hal ini dikarenakan adanya liberalisasi dalam parlemen yang menjamin hak bagi warga sipil dalam *council election* untuk *Legislative Council* pada tahun 1908. Hak-hak perempuan untuk melibatkan dirinya sebagai kandidat dewan dalam pemilu diakui pada tahun 1923 untuk kedua *houses*. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan politik di Victoria mengalami masa transisi ke model pemerintahan federal dengan membentuk sistem pemerintahan *Liberal-Conservative two-party system*.

Dengan adanya proses liberalisasi tersebut, dalam kurun waktu 1901 – 1955 Victoria memiliki 31 menteri yang mewakili setiap aspirasi rakyat di Victoria. Selanjutnya, Victoria dipimpin oleh *Liberal Party* di bawah kepemimpinan Sir Henry Bottle yang membawa Victoria menjadi pelopor utama pada *Melbourne's hosting of the 1956 Olympic Games*, pertambangan minyak dan gas alam Bass Strait, membangun dua universitas yaitu Monash (1958) dan La Trobe (1964) dan beberapa smaller colleges, serta membentuk *the Arts Centre in Melbourne* pada tahun 1968. Pemerintahan selanjutnya semakin menunjukkan perkembangan dalam

berbagai bidang *low politics*, sehingga pada awal 1990 an para pemimpin parlementer di Victoria semakin meningkatkan pembangunannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang *sports*, budaya dan kesenian, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan *mid-city area* seperti Melbourne.

Dari cuplikan sejarah *Victoria State Government* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Victoria menganut sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan para menterinya dalam hal kendali atas kebijakan, penunjukkan, dan perintah eksekutif lainnya. Dalam hal ini, Perdana Menteri ditunjuk oleh Gubernur Victoria dan menjadi anggota *Legislative Assembly* yang didelegasikan oleh kabinetnya. Sedangkan peranan Gubernur adalah sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kewenangan eksekutif berdasarkan ada konstitusi negara bagian melalui Dewan Konstitusi, dimana keduanya sama-sama bersifat seremonial atau sebagai pelaksana konstitusi.

Kepentingan pelaksanaan paradiplomasi oleh pemerintah daerah dan/atau SSGs di setiap negara, yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, telah tercermin pada implementasi kerja sama persahabatan yang memiliki persamaan karakteristik. Dalam skema kerja sama tersebut, kedua pemerintah daerah atau SSGs berperan sebagai aktor yang mengatur dan menjalankan hubungan kerja sama yang melewati lintas batas negara pada bidang-bidang yang disepakati seperti kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan, dan lainnya. Pada contoh studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kerja sama *sister province* antara DIY dan Victoria, Australia di bidang kebudayaan, penulis dapat menganalisa hal-hal yang menjadi faktor utama terjadinya kerja sama dan pada

bidang apa saja kerja sama ini dijalankan. Untuk itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai persamaan karakteristik berupa persamaan status administrasi antara DIY – Victoria dan beberapa bidang yang dijalankan. Namun, implementasi kerja sama *sister* ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hal ini hanya dianggap sebagai kegiatan seremonial saja.

2.1.2 Persamaan Potensi Daerah di Bidang Kebudayaan: Seni Musik dan Manajemen Pertunjukkan

Keterhubungan antara pemerintah daerah dengan mitra-mitranya di luar negeri yang menghubungkan para pihak atas dasar persamaan karakteristik daerah dan persamaan potensi daerah yang dimiliki. Dengan persamaan-persamaan tersebut, para pihak yang bersangkutan dapat saling memberikan kemanusiaan berupa bantuan penanggulangan pandemi dan bencana alam. Selain itu, ada pula hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pertukaran budaya dan transfer teknologi dan pengetahuan. Pemda DIY bersama dengan Negara Bagian Victoria memiliki persamaan pengelolaan kesenian yang terbagi dalam beberapa divisi dan badan pengelola. Pembahasan berikut ini berfokus pada persamaan potensi daerah di bidang kebudayaan berupa kesenian yang mengkolaborasikan antara seni musik orkestra, gamelan, dan tarian. Selain itu, kerja sama *sister province* antara DIY – Victoria juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan pengelolaan kebudayaan dan semakin memperkuat hubungan masyarakat di kedua daerah.

Dilihat dari sejarahnya, wilayah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY merupakan wilayah kerajaan. Hal tersebut menjadi ciri kedaerahan

dimana kebudayaan merupakan sebuah pondasi utama bagi pembangunan DIY dalam berbagai bidang. Kebudayaan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat bagi setiap masyarakat Jogja. Hal ini dikarenakan hukum tata pemerintahan Jogja yang berbasis kultural yang didukung dengan nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menjadi ciri khas dan keistimewaan DIY. Warisan budaya dan cagar budaya yang ada di wilayah DIY juga menggambarkan keberadaan kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, dan benteng ketahanan sosial budaya. Pemerintah DIY telah menyusun Undang-Undang yang mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2012. Peraturan tersebut digunakan sebagai landasan pelaksanaan tata kelola dan pembangunan DIY yang berfokus pada pelestarian warisan budaya yang masih kental di seluruh wilayahnya.⁵⁰

Dalam rangka memperingati 11 tahun peraturan Keistimewaan DIY itu di tahun 2023, Paniradya Kaistimewaan mengadakan serangkaian acara yang berlangsung pada 11 Agustus hingga 11 September 2023. Acara tersebut mengambil tema 'Adheganing Amerta' yang secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk upaya pelestarian warisan budaya dan tradisi Jawa yang menjadi petunjuk pembangunan DIY secara menyeluruh. Menurut Paniradya Pati DIY, Aris Eko Nugroho, Yogya dikenal dengan sebutan kota wisata, kota pendidikan, kota sejarah,

⁵⁰ Humas Pemda DIY, *Kebudayaan Turut Jadi Pilar Pembangunan DIY*, Jogjaprov.Go.Id, 2022, lihat: <https://jogjaprov.go.id/berita/kebudayaan-turut-jadi-pilar-pembangunan-diy>

dan sebagainya. Akan tetapi yang sebenarnya menjadi roh dari semua julukan tersebut adalah budaya. Bukti dari adanya budaya yang menjadi roh dalam pembangunan DIY dapat dilihat dari berbagai macam aktivitas kebudayaan yang difasilitasi dan didukung oleh Dana Keistimewaan (Danais) yang diharapkan sesuai dengan tujuan keistimewaan untuk menghidupi masyarakat. Menurutnya, Ngarsa Dalem atau Sultan Hamengku Buwono X selalu menegaskan bahwa Danais harus dapat menumbuhkan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui aktivitas budaya.⁵¹ Salah satu contohnya yaitu pembiayaan kegiatan budaya Pasar Kangen yang dijadikan sebagai gambaran aktivitas yang memuat nilai-nilai tradisi yang berbasis pada kebudayaan dan ekonomi kerakyatan.⁵²

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, mengatakan bahwa *Kundha Kabudayaan* atau Dinas Kebudayaan DIY yang juga menjadi salah satu pengelola kebudayaan DIY sedang berfokus pada pengembangan ekonomi melalui kegiatan kebudayaan yang dibiayai oleh Danais, penataan cagar budaya seperti Poros Mataram sebagai cikal bakal Kasultanan Ngayogyakarta, sidang UNESCO terhadap Sumbu Filosofi menjadi Kawasan cagar budaya bertaraf internasional, serta pengembangan seni budaya yang ada di DIY.⁵³ Kesenian yang ada di DIY sangat beragam mulai dari seni batik, seni lukis dan patung, seni musik berupa gamelan, karawitan, dan orkestra, serta seni tari dan

⁵¹ Pandangan Jogja, *11 Tahun Keistimewaan DIY, Roh Yogya Adalah Budaya*, Kumparan.Com, 2023, lihat: <https://kumparan.com/pandangan-jogja/11-tahun-keistimewaan-diy-roh-yogya-adalah-budaya-20zpT6M7KuD>

⁵² PASAR KANGEN, *EVENT PASAR KANGEN*, www.pasarkangen.com, lihat: <https://www.pasarkangen.com/>

⁵³ Pandangan Jogja, *Op. Cit.*

lainnya. Dalam hal pengembangan kesenian yang sudah mencapai level internasional, Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga di luar negeri yang ada di Victoria, Australia yaitu *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO) sejak tahun 2016 lalu.⁵⁴ Kerja sama ini telah berjalan sejak 8 tahun lamanya dengan berbagai pertunjukkan kolaborasi antara musik orkestra dan gamelan sehingga menciptakan alunan irama yang indah. Tidak hanya itu, pada setiap pertunjukkan kolaborasi antara seniman DIY dan MSO terdapat peranan seni tari yang mempertegas alur cerita yang dibawakan dalam setiap tema pertunjukannya.

Negara Bagian Victoria merupakan sebuah wilayah negara bagian yang sebelumnya memiliki sejarah panjang terhadap multikulturalisme penduduknya. Wilayah ini terdiri dari berbagai etnis yang berasal dari <300 keturunan, 290 bahasa, serta <200 keyakinan yang berbeda. Hal inilah yang menjadikan Victoria sebagai pusat kebudayaan yang ada di Australia. Keragaman yang dimiliki membuka peluang besar bagi perkembangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang diakibatkan oleh adanya kekayaan ide, semangat belajar hal baru, menarik perhatian dunia bisnis, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Ketiga faktor itu diperkuat dengan adanya keterhubungan antara satu dan lainnya, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap nilai kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi di kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Negara Bagian Victoria melalui Perdana Menteri dan kabinetnya telah membentuk badan-badan yang berperan dalam mengatur pengelolaan di

⁵⁴ Roza Yulia Sari, *Op. Cit.*

masing-masing bidang. Dalam hal pengelolaan kebudayaan, pemerintah setempat memiliki kebijakan yang disebut dengan *multicultural policy statement*.⁵⁵ Kebijakan tersebut digunakan untuk membantu pemerintah menentukan visi kebudayaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas publik, menjaga konektivitas dengan budaya yang dimiliki, menjamin hak—keamanan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Untuk memenuhi target visi itu, maka dibentuk badan-badan seperti *Creative Victoria*, *State Library of Victoria*, *National Gallery of Victoria* (NGV), *Museum Victoria*, dan ACMI sebagai badan pemerintah yang menjadi pusat layanan dan informasi tentang kesenian (*arts*), budaya (*culture*), dan warisan budaya (*heritage*).⁵⁶

Creative Victoria merupakan salah satu dari banyaknya badan yang dibentuk pemerintah untuk menangani hal-hal seperti mempromosikan, menumbuhkan, dan mendorong adanya pelayanan terhadap industri kreatif Victoria. Badan ini memberikan kesempatan bagi siapa saja termasuk masyarakat, organisasi, *event* dan proyek tertentu yang membantu pemerintah menciptakan negara bagian yang kreatif dan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keragaman pengalaman budaya yang ada.⁵⁷ Seni pertunjukan, seni musik, *design*, pengembangan *digital game*, film dan televisi, *fashion*, *literature* dan penyebaran

⁵⁵ Victorian Government, *Multicultural Policy Statement*, VIC.GOV.AU, lihat: <https://www.vic.gov.au/multicultural-policy-statement>

⁵⁶ Victorian Government, *Arts, Culture and Heritage*, VIC.GOV.AU, lihat: <https://www.vic.gov.au/arts-culture-and-heritage>

⁵⁷ Creative Victoria, *About Creative Victoria*, Creative.VIC.GOV.AU, lihat: <https://creative.vic.gov.au/about/about-creative-victoria>

informasi digital, dan lain sebagainya merupakan gagasan yang berdampak pada perkembangan talenta-talenta di Victoria. Maka dari itu, para pemangku kepentingan setempat sangat mendukung adanya pengakuan terhadap keturunan Aborigin di Victoria sebagai manusia pertama yang menghuni wilayah ini dan menjadi cikal bakal adanya keragaman budaya sampai saat ini.

Salah satu bidang kesenian yang didukung secara finansial oleh *Creative Victoria* sebagai departemen yang mengatur tentang urusan Pekerjaan, Keterampilan, Industri, dan Wilayah di Victoria adalah seni musik orkestra yang merupakan sebuah perseroan terbatas berpemilik bernama *Melbourne Symphony Orchestra Pty Ltd* (MSO). MSO merupakan asosiasi orkestra terkemuka di Australia sejak tahun 1960 dan menjadi tonggak utama keragaman warisan budaya di negara ini.⁵⁸ Sampai dengan tahun 2022, *Creative Australia* yang merupakan badan pendanaan dan penasihat seni di tingkat Pemerintah Persemakmuran (*the Commonwealth Government*) telah menjadi investor utama dalam pertumbuhan serta perkembangan aktivitas asosiasi ini. Selain itu, MSO juga mendapatkan *sponsorship* yang berasal dari Emirates, maskapai penerbangan kenamaan UAE, yang menunjukkan dukungannya terhadap MSO sebagai grup musik internasional bergengsi tingkat dunia dengan menghubungkan para pecinta musik dari berbagai belahan dunia untuk menikmati pengalaman penerbangan dengan hiburan konser musik klasik di dalam pesawat.⁵⁹

⁵⁸ Melbourne Symphony Orchestra, *About the MSO*, WWW.MSO.COM, lihat: <https://www.mso.com.au/behind-the-music/about-us>

⁵⁹ Melbourne Symphony Orchestra, *Emirates Principal Partner*, WWW.MSO.COM, lihat: <https://www.mso.com.au/behind-the-music/partners/principal-partner-emirates>

Hubungan kerja sama teknis antara Pemda DIY dan *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO) yang telah terjalin sejak tahun 2016 lalu. Kerja sama keduanya bermula dari inisiasi pagelaran pertunjukan musik kolaborasi seniman DIY dan MSO di Pelataran Candi Prambanan. Kerja sama ini kemudian dilanjutkan hingga tahun 2023, kedua pihak masih terus melanjutkan hubungan kerja sama berupa pengiriman delegasi DIY ke Victoria dalam program *Youth Music Camp* yang dibina oleh para pengajar dari MSO dan pertunjukan kolaborasi yang dilakukan setiap tahun. Hubungan kerja sama ini juga mendapatkan apresiasi dari kedua pemimpin daerah, Premier Victoria dan Gubernur DIY, dan diharapkan dapat dijalankan bersama untuk menjalin hubungan persahabatan dan kedekatan antara keduanya.

2.2 Urgensi dan Kronologi Penyusunan Kerja Sama *Sister Province* DIY – Victoria, Australia di Bidang Kebudayaan

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah wilayah yang penuh dengan keragaman budaya dan kekayaan alam yang melimpah yang diperuntukkan sebagai destinasi wisata dan sarana untuk memajukan ekonomi kreatif dan inovatif di daerah setempat guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Jogja. Wilayah ini dipimpin oleh seorang gubernur yang juga menjabat sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat ini, Gubernur DIY yang dibantu oleh berbagai elemen pemerintahan sedang berusaha untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025. Untuk mendukung hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta mengeksplorasi salah satu warisan budayanya yaitu Sumbu Filosofi Yogyakarta yang akan digunakan sebagai salah

satu daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sebagai salah satu dari banyaknya warisan budaya yang dilindungi di Indonesia, Sumbu Filosofi ini sedang diupayakan untuk terdaftar sebagai salah satu Warisan Dunia (*World Heritage*) versi UNESCO.⁶⁰

Dengan cerita uniknya tentang perjalanan hidup manusia, digambarkan kehidupan manusia itu dimulai dari lahir menuju Sang Pencipta. Hal itu tergambar pada penataan ruang kota Yogyakarta yang telah dirancang sejak awal oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) saat pendirian Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755. Perancangan ini didasarkan pada filosofi “*manunggaling kawula lan Gusti*”, “*golong gilig*” “*sangkan paraning dumadi*” di mana kehidupan bermula dari kelahiran (Utara di Panggung Krpyak hingga Kraton Yogyakarta dan berakhir di Tugu Pal Putih di Selatan) sebagai akhir kehidupan manusia untuk menemui Sang Pencipta. Sumbu Filosofi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Kosmologi Jawa dimana kehidupan diibaratkan sebagai wujud hubungan sinergi yang harmonis antara dua sumber kekuatan yang diwakili oleh Gunung Merapi di bagian Utara dan Laut Selatan di bagian Selatan yang seolah-olah terhubung oleh sebuah sumbu imajiner.⁶¹

⁶⁰ BKD DIY, *MODUL PEMBEKALAN KEISTIMEWAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DIY.Pdf*, 2023.

⁶¹ Dinas Kebudayaan DIY, *Op. Cit.*

2.2.1 Urgensi Kerja Sama *Sister Province* DIY – Victoria, Australia di Bidang Kebudayaan

Pengembangan potensi daerah DIY juga tidak bisa dipisahkan dari apa yang menjadi arah kebijakan pembangunan Pemda DIY baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka Panjang. Pengembangan potensi DIY harus mengacu pada apa yang menjadi visi dari rencana pembangunan jangka panjang dari tahun 2005 sampai dengan 2025 nanti. Adapun penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari kerangka visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025. Visi itu bertujuan untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai berikut ini.

1. Pusat pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya Pendidikan yang handal.
2. Pusat budaya adiluhung yang didukung dengan konsep pengetahuan budaya dan pelestariannya, serta dapat mengembangkan hasil budaya dengan nilai-nilai budaya yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif dengan berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Keempat visi tersebut memiliki satu basis yang sama yaitu kebudayaan. Gubernur DIY menginginkan adanya pemanfaatan budaya dalam setiap bidang agar dapat terus dilestarikan. Sebagai kajian dalam penelitian ini, hal yang dilakukan

pemda DIY dalam upaya untuk mencapai visi tersebut adalah dengan melakukan kerja sama persahabatan dengan beberapa mitranya di luar negeri. Pemda DIY telah menjalin kerja sama persahabatan sejak tahun 2017 dengan Negara Bagian Victoria, Persemakmuran Australia di beberapa bidang, salah satunya kebudayaan. Kerja sama persahabatan di bidang kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam kolaborasi seni musik dan seni tari yang ada di DIY dan Victoria.

Pemerintah Negara Bagian Victoria, sebagai salah satu negara bagian di Australia, sangat mendukung kolaborasi pertunjukan musik antara tim Kesenian DIY dan *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO) yang diharapkan mampu mempererat hubungan antara DIY dan Victoria, dimana kebudayaan di Victoria terdefinisi sebagai kekayaan yang dijaga dan dilestarikan pula. Australia sendiri merupakan negara yang memiliki ragam budaya dan rumah bagi komunitas yang berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut berasal dari Penduduk Asli Aborigin dan Pulau Torres Strait yang menjadi pemilik daratan, laut, dan perairan di Benua Australia. Maka dari itu, pemerintah setempat terus melakukan perubahan dan pemberdayaan terhadap budaya yang telah ada sejak lebih dari 60.000 tahun tersebut dan juga menjadi inti dari kisah asal-mula pendirian Australia.⁶² Seni dan budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Australia dikarenakan keduanya telah disepakati untuk menjadi tujuan pembangunan daerah untuk menghormati para pendahulunya.

⁶² Tourism Australia, *ABORIGIN AUSTRALIA*, www.australia.com, lihat: <https://www.australia.com/id-id/things-to-do/aboriginal-australia.html>

Victoria memiliki berbagai jenis kesenian yang tetap dilestarikan. Pada masing-masing bidang kesenian berada pada naungan badan-badan yang dibentuk oleh *the arts, culture, and heritage of the Victorian Government*. Badan-badan tersebut meliputi *Creative Victoria, State Library of Victoria, National Gallery of Victoria,* dan *Museums Victoria*, serta ACMI. *Creative Victoria* memberikan dukungan kepada asosiasi industri kreatif di Victoria, dimana dimensi industri yang dimaksud mencakup seni pertunjukan dan visual, budaya, musik, layar, desain, dan lain sebagainya.⁶³

MSO sebagai orkestra unggulan dan cikal bakal warisan budaya Victoria yang beragam telah berhasil menarik perhatian lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya dengan cara menyelenggarakan 180 *event* untuk publik seperti *live performances*, TV, radio, dan siaran online menggunakan platform digital, MSO.LIVE yang dilihat oleh penduduk dunia dari 56 negara yang berbeda. Keberhasilan tersebut membawa MSO menjadi salah satu orkestra dengan reputasi internasional yang bekerja dengan para pemimpin *First Nations* dengan mengkolaborasikan beragam budaya untuk membangun komunitas sebagai alat penyampaian musik kepada masyarakat di Melbourne, Victoria dan seluruh dunia. MSO mulai menggelar pertunjukan seni musik orkestra di luar negeri pada tahun 1965, dimana pada 5 tahun kemudian *the First Australian Orchestra* ini melakukan *debut* di Carnegie Hall, New York. MSO juga memperkuat hubungan dengan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan tahunan di beberapa negara Asia seperti China, Indonesia, dan Singapore, serta membangun ikatan dengan orkestra kelas dunia lainnya misalnya

⁶³ Victorian Government, *Op. Cit.*

*London Symphony Orchestra, Singapore Symphony Orchestra, dan the National Centre for Performing Arts in Beijing.*⁶⁴ Aktivitas MSO yang didanai oleh *Creative Victoria* dan didukung oleh mitra-mitranya melalui *sponsorship* bertujuan untuk memberikan tempat bagi para pecinta musik dari berbagai kalangan dan daerah agar mendapatkan akses terhadap musik MSO dan Orkestra secara langsung. Selain itu, program-program yang ada juga menawarkan program pembelajaran manajemen seni yang berakurasi, penjadwalan *regional touring*, konser yang dapat diakses dan kegiatan komunitas gratis.⁶⁵

Pada kesempatan konser kolaborasi MSO dan peserta *Youth Music Camp* di Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 11 Mei 2023, Direktur Manager MSO, Sophie Galaise mengungkapkan rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada Pemda DIY dan Dinas Kebudayaan DIY yang telah meminta pihak MSO dalam rangka memberikan *workshop* musik dan manajemen pertunjukan seni bagi talenta muda musisi berbakat di Yogyakarta yang telah dimulai sejak tahun 2016. Menurutnya, Yogyakarta menjadi rumah kedua dan tempat yang sangat dicintai oleh pihaknya meskipun telah melakukan *international touring* ke berbagai negara lainnya.⁶⁶ Kegiatan kolaborasi dan *transfer knowledge* seperti program magang *Youth Music Camp* bagi musisi bertalenta Yogyakarta ke Victoria yang dimentori secara langsung oleh pengajar MSO, memberikan kesan

⁶⁴ Melbourne Symphony Orchestra. *Op. Cit.*

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Kundha Kabudayaan, *Konser Kolaborasi MSO Dan Youth Music Camp, Komposisi Baru*, Budaya.Jogjaprovo.Go.Id, 2023, lihat: <https://budaya.jogjaprovo.go.id/berita/detail/1474-konser-kolaborasi-mso-dan-youth-music-camp-komposisi-baru>

tersendiri bagi kedua pihak sehingga mendapatkan apresiasi tinggi, baik dari Gubernur DIY maupun para pemimpin di Victoria dan Australia. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan kuat bagi Pemda DIY dan Premier Victoria untuk memperkuat kerja sama teknis menjadi kerja sama persahabatan melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dua pihak dalam kerja sama *sister province* DIY-Victoria. MoU tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang kebudayaan, mendorong pertukaran di bidang pendidikan, dan menciptakan kesempatan bagi keduanya di bidang industri inovatif.⁶⁷

2.2.2 Kronologi Penyusunan MoU Kerja Sama *Sister Province* DIY – Victoria, Australia di Bidang Kebudayaan

Melalui bukunya yang berjudul “*PARADIPLOMACY: Cities and States as Global Players*”, Tavares menyatakan adanya perbedaan antara diplomasi dan paradiplomasi dalam *term* yang digunakan. Adapun perbedaan tersebut terlihat dari beberapa hal seperti isu apa yang dikerjasamakan (*on the issue*), ketertarikan untuk berpartisipasi (*on participation*), metode dalam kerja sama (*on the modus operandi*), dan tujuan yang ingin dicapai (*on the final goal*). Keempat hal tersebut merupakan kunci dari adanya kehendak untuk menyampaikan inisiasi kerja sama sebelum ditandatanganinya LoI kerja sama. Para pemimpin, baik di DIY maupun di Victoria telah berdiskusi dan bersepakat dalam bidang-bidang kerja sama nantinya. Ketertarikan untuk berpartisipasi juga ditunjukkan dalam semakin

⁶⁷ The Government of Yogyakarta Special Region & The State Government of Victoria, “*Memorandum of Understanding Between The Government of Yogyakarta Special Region, Republic of Indonesia & The State Government of Victoria, Commonwealth of Australia Concerning Friendly Cooperation*,” 2017.

gencarnya komunikasi dan kunjungan kerja masing-masing *stakeholders* di kedua daerah. Adapun metode yang digunakan adalah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kerangka kerja sama *sister province*, untuk menyesuaikan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya penandatanganan MoU kerja sama. Tujuan yang ingin dicapai adalah hasil kesepakatan bersama yaitu untuk meningkatkan *close-bonding* antar masyarakat dan meningkatkan kesepahaman budaya di kedua daerah, sehingga dapat menjaga kelanggengan hubungan kemitraan/persaudaraan bagi keduanya.

Pada dasarnya hubungan kedekatan antara DIY dan Victoria didasari oleh adanya kedekatan antara Indonesia dan Australia yang telah berlangsung sejak lama. Dimana kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama di bidang kebudayaan pada 14 Juni 1968 di Jakarta.⁶⁸ Kedekatan keduanya dapat tetap terjalin karena letak geografis yang tidak terpaut terlalu jauh. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Australia terus mempererat hubungan dengan berbagai kerja sama bilateral, salah satunya dengan membentuk *Australia-Indonesia Centre* (AIC) di Monash University, Australia.⁶⁹ Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesepahaman antar masyarakat di kedua negara melalui pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata, serta inovasi lainnya melalui kerja sama yang dilakukan oleh antar Perguruan Tinggi di kedua daerah. Selain itu, KJRI Melbourne sebagai wakil Indonesia di Victoria juga memfasilitasi berbagai

⁶⁸ KJRI Melbourne, "Laporan Kunjungan Kerja Ke Yogyakarta 14-20 Nov 2015 Dan Dokumen MoU AIC-DIY," 2015.

⁶⁹ Australia-Indonesia Centre, "About," australiaindonesiacentre.org, n.d., lihat: <https://australiaindonesiacentre.org/about/partners/>.

kegiatan seperti Festival Indonesia sejak tahun 2005, sebagai forum bisnis dan sarana penguat hubungan sosial-budaya Indonesia-Australia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu *event* promosi potensi daerah Indonesia terbesar se-Asia dan Australia. Pemda DIY mengajukan diri menjadi tema FI tahun 2011, dimana hal ini membuat hubungan kedekatan antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria mulai terjalin.

Pemda DIY dan Pemerintah Negara Bagian Victoria telah melakukan beberapa kali pertemuan, dimana kedua daerah saling mengirimkan delegasi untuk mendampingi Gubernur masing-masing dalam rangka peninjauan kerja sama bagi kedua pihak. Inisiasi kerja sama ini diawali dengan hadirnya Premier Victoria, Mr. Denis Naphine bersama rombongan 450 UKM Victoria untuk peninjauan peluang bisnis di Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, para pemimpin menyepakati adanya rencana pembentukan kerja sama persahabatan antara DIY dan Victoria. Hal ini juga disambut baik oleh Pemda DIY sehingga Gubernur DIY bersama delegasinya melakukan kunjungan balasan di awal tahun 2014 yang juga dimediasi oleh KJRI Melbourne. Pembahasan kerja sama meliputi beberapa bidang seperti pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, serta sektor industri dan ekonomi kreatif.

Dalam hal rencana kerja sama antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia di bidang kebudayaan secara langsung difasilitasi oleh *Australia Indonesia Centre* (AIC) yang dibentuk oleh Pemerintah Australia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Australia tentang Indonesia sehingga dapat memperkuat dan memperdalam hubungan kerja

sama oleh keduanya dalam berbagai bidang salah satunya adalah kebudayaan dan *people to people cooperation*.⁷⁰ Pemda DIY dan AIC telah banyak melakukan koordinasi dan pembahasan kerja sama di bidang ini untuk melakukan kerja sama untuk melakukan pementasan kolaborasi *Melbourne Symphony Orchestra* (MSO) dan Gamelan DIY yang akan mengiringi tarian adat keduanya sebagai penunjuk alur ceritanya. Dalam hal ini, keduanya merencanakan adanya pelatihan musik remaja (*Youth Music Camp I*) bagi pelajar Yogyakarta dan diakhiri dengan konser bersama antara sekelompok kecil musisi Australia dan peserta pelatihan musik di Yogyakarta pada tahun 2016, dilanjutkan pada tahun 2017 untuk pelatihan musik (*Youth Music Camp II*) dalam Kelas Master untuk pelajar dan seniman DIY diikuti dengan pementasan pertama MSO di Pelataran Candi Prambanan atau tempat bersejarah lainnya dengan pengiriman musisi MSO. Mengingat akan pentingnya pengelolaan dan manajemen kerja sama ini yang juga akan meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan Yogyakarta, kedua pihak bersepakat untuk meresmikan kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang bersifat teknis antara Pemda DIY – AIC tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Kebudayaan di Yogyakarta yang diusulkan pada September 2014 dan disahkan pada 16 November 2015.

Di samping itu organisasi kesenian tertinggi di Victoria, *Multicultural Arts Victoria* (MAV) juga melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas kelanjutan rencana kerja sama terkait dengan rencana kunjungan Gubernur DIY dan delegasinya ke Victoria

⁷⁰ Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY, *Rekom Kerja Sama AIC - Pemda DIY*, 2014.

tahun 2015 dimana salah satu agendanya adalah penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) kerja sama persahabatan kedua daerah yang diwakili oleh Kepala Badan Kerja sama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, Bapak Totok Prianamto dan Komisioner Victoria untuk Indonesia, Mr. Brett Stevens.⁷¹ Kunjungan ini juga bermaksud memberikan dukungan terhadap rencana kerja sama yang digagas oleh Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria dengan memperkenalkan kegiatan *Multicultural Arts Victoria* dan *Victorian Government Business Office* (VGBO), terutama yang difokuskan pada bidang kebudayaan dan pendidikan. MAV merupakan organisasi yang bekerja sama dengan KJRI Melbourne dan AIC untuk saling terhubung dengan komunitas lokal Indonesia yang mempresentasikan kelompok-kelompok kebudayaan Indonesia pada beberapa acara penting dalam kalender Negara Bagian Victoria, Australia juga *Premier's Gala Dinner* dan *Viva Victoria*.⁷² Pada tahun 2016, MAV kembali bersurat kepada Gubernur DIY dalam rangka untuk memohon dukungan Gubernur DIY dalam acara *Mapping Melbourne Desember 2017* agar mengirimkan delegasi DIY yaitu RM. Altiyanto Henryawan dan R. Ay. Sri Kadarjati Ywandjana dari Paguyuban Seni Rupa Kencana untuk mempersembahkan pementasan kesenian pada acara tersebut. Hal ini dikarenakan oleh adanya kunjungan paguyuban tersebut ke Melbourne, Victoria pada tahun sebelumnya.⁷³ Pada 15 Desember 2016, KJRI Melbourne menyampaikan *counter*

⁷¹ Yogyakarta Special Region; The State of Victoria, "*Letter of Intent on Friendly Cooperation Between Yogyakarta Special Region, Indonesia and The State of Victoria, Australia*", 2015.

⁷² Multicultural Arts Victoria, *Surat Kunjungan Perwakilan Multicultural Arts Victoria (MAV) 9-10 Juni 2015 Ke Yogyakarta Dalam Rangka Menghadiri Pembukaan Pameran Street/Life*, 2015.

⁷³ Multicultural Arts Victoria, *Undangan "Mapping Melbourne 2017" Untuk Tim Paguyuban Seni Rupa Kencana DIY*, 2016. Qrr

draft MoU kerja sama persahabatan DIY – Victoria untuk dilakukan beberapa revisi mengingat adanya perbedaan antara *draft* MoU dari pihak DIY dan pihak Victoria, namun secara substansi masih dalam cakupan bidang-bidang yang disepakati kedua pihak.⁷⁴

Pemda DIY dan delegasinya kembali melakukan perjalanan dinas ke Melbourne, Victoria pada tanggal 22 – 26 Februari 2017 dalam rangka menghadiri undangan Pemerintah Victoria dan MSO, serta pengiriman misi kebudayaan. Adapun agenda kunjungan ini meliputi pertemuan dengan Minister Phillip Dalidakis dan institusi bisnis terkait, dimana pada kesempatan ini Wakil Gubernur DIY menyampaikan beberapa usulan seperti mengadakan pembukaan penerbaangan langsung DIY – Melbourne setelah pembangunan bandara internasional DIY rampung sehingga terdapat fasilitas transportasi yang lebih efisien. Dalam agenda kunjungan ini, Pemda DIY dan delegasinya juga turut serta dalam rangkaian kolaborasi MSO dan seniman DIY dalam pagelaran “Setan Jawa” pada acara pembukaan *Asia Pacific Triennial of Performing Art (ASIA TOPA)* 2017. Selain itu, para delegasi dan pegawai pemerintahan di kedua negara juga mendiskusikan tentang tindak lanjut *draft* MoU Kerja Sama DIY – Victoria dengan Amelia Fayfield dari *Department of Economic Development, Jobs, Transport & Resources* yang menghasilkan kesepakatan bahwa *draft* akhir MoU akan disahkan secara resmi saat kedua pemimpin daerah bertemu tatap muka. Pertemuan dengan MSO juga dilakukan dalam hal untuk membahas rencana pertunjukan MSO di Candi Prambanan tahun 2017 dengan pengiriman 30 musisi MSO yang akan

⁷⁴ KJRI Melbourne, *Penyampaian Counter Draft MoU Victoria - DIY*, 2016.

dihadiri oleh Gubernur Victoria dan beberapa pejabat lain, serta rencana pemberian beasiswa bagi 2 (dua) peserta *Youth Music Camp 2016* untuk magang di MSO selama 1 (satu) bulan selama 30 Oktober – 25 November 2017 dengan pembiayaan *fully funded* di Melbourne dan DIY hanya menyediakan transportasi penerbangan DIY – Melbourne.⁷⁵

Setelah adanya beberapa kali kunjungan, baik dari pihak DIY dan Victoria, keduanya telah bersepakat menandatangani *draft* akhir MoU kerja sama persahabatan. Berdasarkan atas pertimbangan terhadap masukan KJRI Melbourne, *draft* MoU tersebut akan ditandatangani secara terpisah oleh Perdana Menteri Victoria, Hon Daniel Andrews MP pada 26 April 2017 rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di tempat. Selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh Gubernur Victoria, H.E. The Honourable Linda Dessau AC, ke Yogyakarta dalam rangkaian kunjungannya. Pihak Pemerintah Victoria memohon agar acara penandatanganan oleh Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, dilakukan pada 4 Mei 2017 pada saat acara jamuan makan malam di Kraton Yogyakarta dengan disaksikan oleh suami Gubernur Victoria, Mr. A. Howard, dan delegasi Pemerintahan Victoria serta delegasi Pemda DIY, pun juga istri dari Gubernur DIY Gusti Kanjeng Ratu Hemas.⁷⁶

Kerja sama *sister province* yang berjalan antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia telah diatur dalam payung hukum MoU Kerja Sama *Sister*

⁷⁵ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Wakil Gubernur DIY 20 April 2017*, 2017.

⁷⁶ BKPM DIY, *Rencana Kunjungan Gubernur Victoria Ke Yogyakarta 3 - 4 Mei 2017*, 2017.

Province DIY – Victoria. Tujuan pembentukan MoU tersebut untuk menyediakan *framework* bagi kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya antara Pemda DIY dan MSO yang telah terlebih dahulu menjalankan kerja sama di bidang kebudayaan. Dalam rangka kunjungan kehormatan delegasi MSO ke Yogyakarta pada tahun 2017, pihaknya menghendaki diaturnya pengaturan kerja sama teknis antara Pemda DIY – MSO.⁷⁷ Pengaturan kerja sama teknis tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Umar Priyono dan *Chairman of the Board* MSO, Michael Ullmer pada 4 Agustus 2017 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.⁷⁸ Pengaturan ini dibuat untuk bersama-sama memfasilitasi kegiatan seperti pertunjukan oleh pemusik Australia dan seniman DIY di Candi Prambanan atau tempat bersejarah lainnya pada tahun 2017, kelas Master untuk para siswa dan seniman DIY dalam kegiatan *Youth Music Camp II* pada tahun 2017, program magang untuk 2 siswa terbaik selama dua bulan di markas MSO, Melbourne. Selain itu juga diatur tentang *Youth Music Camp III* pada tahun 2018 dan diakhiri dengan pertunjukan sekelompok kecil musisi MSO dan peserta *Youth Music Camp*. Selanjutnya diikuti dengan tabel *timeline* tahapan-tahapan proses terjadinya kerja sama dan implementasi kerja sama persahabatan antara DIY dan Victoria, Australia di bidang kebudayaan.

⁷⁷ BKPM DIY, *Kunjungan Kehormatan Delegasi MSO 27 Juli 2017, 2017*.

⁷⁸ Daerah Istimewa Yogyakarta; Melbourne Symphony Orchestra, *MoU DIY-MSO Versi Indonesia, 2017*.

Tabel 2. 1 Tahapan-Tahapan Proses Kerja Sama

Sister Province DIY – Victoria Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020

Agenda	Keterangan
Prakarsa (Inisiasi Kerja Sama)	Penyampaian maksud dalam kunjungan Premier Victoria, Daniel Napthine bersama 450 delegasi UMKM Victoria untuk mencari peluang bisnis
Penjajakan	Penggalian informasi untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional melalui teknologi komunikasi
Penyusunan Kajian	Apabila hasil penjajakan disepakati oleh kedua daerah maka diikuti dengan tindak lanjut penyusunan kajian (LoI) dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun pasca penandatanganan
Penyusunan Rencana Kerja Sama (Konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri)	Penyusunan kerja sama dapat dilakukan atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri sebelum ditandatanganinya LoI kerja sama
Persetujuan DPRD	Rencana KSDPL yang telah disetujui oleh Menteri diajukan ke DPRD, akan tetapi setelah 45 hari tidak ada pernyataan persetujuan/penolakan DPRD, Rencana Kerja Sama dianggap disetujui oleh DPRD

Verifikasi	Menteri melakukan pengkajian terhadap Rencana Kerja Sama untuk dilakukan perbaikan atau dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama
Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama	Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL yang memuat judul, subjek kerja sama, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, pembiayaan, kelompok kerja, penyelesaian penyelesaian, amandemen, masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran, serta tanggal dan tempat penandatanganan
Pembahasan Rancangan Naskah Kerja Sama	Rapat antarkementrian/lembaga pemerintah nonkementerian, biro hukum, dan daerah yang terlibat dalam kerja sama serta penyerahan Surat Konfirmasi hasil pembahasan menteri urusan Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
Persetujuan Menteri Dalam Negeri	Hasil keputusan persetujuan Menteri disampaikan melalui Sekjen kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah menyampaikan rencana dan tempat penandatanganan Naskah Kerja Sama (MoU)
Penandatanganan Naskah Kerja Sama (MoU)	MoU Kerja Sama Sister Province DIY-Victoria ditandatangani dalam 2 versi (Indonesian dan English) di Victoria pada 26 April 2017 dan di DIY pada 04 Mei 2017
Pelaksanaan/Implementasi Kerja Sama	Tahun 2017 hingga 2020

Tabel 2. 2 *Timeline Implementasi Kerja Sama Sister Province*

DIY – Victoria di Bidang Kebudayaan

Date	Agenda
(2016)	<i>Youth Music Camp I</i> dan konser bersama antara musisi MSO dan peserta pelatihan musik di <i>Concert Hall ISI Yogyakarta</i> .
(2017)	<ul style="list-style-type: none">○ Penandatanganan Nokta Kesepahaman (MoU) Kerja Sama <i>Sister Province</i> antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia pada 26 April 2017 di Victoria dan pada 4 Mei 2017 di Yogyakarta.○ Pagelaran “Setan Jawa” karya Garin Nugroho berkolaborasi dengan musisi MSO pada acara pembukaan ASIA TOPA di Melbourne.○ <i>Youth Music Camp II</i> dan konser pertama MSO di Indonesia berkolaborasi dengan peserta pelatihan musik dan seniman DIY di Pelataran Candi Prambanan.○ Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama teknis antara Pemda DIY (Dinas Kebudayaan DIY) dan <i>the State Victoria, Australia</i> (MSO) pada 4 Agustus 2017 untuk pelaksanaan <i>Music Camp</i> dan magang selama tahun 2017 dan 2018.○ Pengiriman 2 (dua) peserta <i>Youth Music Camp</i> terbaik ke Melbourne untuk melaksanakan magang di MSO selama 30 Oktober – 25 November 2017.
(2018)	<i>Youth Music Camp III</i> dan konser bersama di Taman Budaya Yogyakarta.

(2019)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kunjungan kerja Gubernur DIY dan delegasi ke Australia selama 8 – 14 September 2019 meliputi agenda berikut ini.⁷⁹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan Gubernur DIY dan Gubernur Victoria serta Premier Victoria, Hon. Daniel Andrews untuk membahas kelanjutan Nokta Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Persahabatan DIY – Victoria, Australia yang akan berakhir pada awal tahun 2020. ▪ Pertemuan para petinggi daerah, Gubernur DIY, Gubernur Victoria, dan Premier Victoria dengan pihak MSO untuk membahas kelanjutan <i>Implementation Arrangement</i> atau perjanjian kerja sama teknis antara Pemda DIY dan MSO tahun 2017. ○ <i>Youth Music Camp Internship</i> 2019 (2 peserta terbaik <i>Youth Music Camp II</i> dan 2 perwakilan Keraton Ngayogyakarta ke markas MSO di Melbourne).
2022	<p>Setelah vakum selama tahun 2020 – 2021 karena pandemic COVID-19, Dinas Kebudayaan DIY dan MSO kembali mengatur dokumen perjanjian kerja sama teknis yang berlaku untuk tahun 2022 – 2024 yang ditandatangani oleh Ibu Dian Lakshmi Pratiwi selaku Kepala Disbud DIY dan Ms. Shopie Galasie selaku <i>Managing Director MSO</i> dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Sri Paku Alam X dan Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Ms. Fiona Hoggart.</p>
(2023)	<p>Konser Kolaborasi MSO dan <i>Youth Music Camp</i>, Komposisi Baru.</p>

⁷⁹ Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, *Laporan Persiapan Rencana Kunjungan Kerja Gubernur DIY Dan Delegasi Ke Australia 8 - 14 September 2019, 2019.*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa implementasi kerja sama *sister* di bidang kebudayaan dilaksanakan selama masa berlaku MoU antara Pemda DIY dan Negara Bagian Victoria, Australia dan berakhir pada tahun 2020. Hal ini tidak berpengaruh pada keberlanjutan kerja sama teknis yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dan MSO yang membuat kesepakatan kerja sama teknis pada tahun selanjutnya. Konser bersama antara pemusik Yogyakarta dan MSO di tahun 2022 setelah berakhirnya pandemi COVID-19 menunjukkan keseriusan kedua daerah untuk melanjutkan kerja sama persahabatan ini. Hal ini menguatkan alasan para pemimpin di kedua daerah untuk melanjutkan dan menyusun nokta kesepahaman yang baru. Adapun pada halaman berikutnya merupakan dokumentasi perjalanan kerja sama *sister* antara DIY dan Victoria, terutama di Bidang Kebudayaan yang diperoleh oleh penulis saat menjalankan program magang di DPMPTSP DIY

Gambar 2. 1 Penandatanganan MoU tahun 2017



Gambar 2. 2 *Youth Music Camp dan Kolaborasi Pertunjukan antara Seniman DIY dan Pemusik MSO 2016 – 2017*

